

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan hasil penelitian di bawah ini:

5.1.1 Proses *Collaborative Governance*

Pemerintah Kabupaten Situbondo melakukan proses kolaborasi dengan beberapa pihak untuk menanggulangi prostitusi di eks lokalisasi Gunung Sampan dengan melibatkan PCNU, Dinas Sosial Mami Kasih, LSM, Akademisi dan Masyarakat. Stakeholder bersama-sama melakukan agenda untuk menangani prostitusi sesuai dengan Perpub Rencana Aksi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Perempuan dan Anak Kabupaten Situbondo, Tim Koordinasi Pelaksanaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

a. Dialog Tatap Muka

Tahapan dialog tatap muka dalam penanggulangan prostitusi berhasil dijalankan dengan dengan maksimal satu kali dalam tiga bulan namun tidak teragenda melainkan kondisional, beberapa negosiasi yang dominan dilakukan oleh Satpol PP dan PCNU dengan kesepakatan tetap bekerja sesuai dengan tupoksi dan setiap kegiatannya diketahui oleh Sekda Kabupaten Situbondo. Dalam negosiasi juga dihadiri sekda untuk untuk menampung gagasan stakeholder yang terlibat dan agar mengetahui

tugasnya. Tahapan ini hanya ada beberapa pihak yang aktif sehingga tidak efektif karena adanya peserta yang dominan.

b. Membangun Kepercayaan dan Komitmen

Dalam proses membangun kepercayaan sudah ada di masing-masing *stakeholder*. Kepercayaan yang dimiliki berupa pelaporan adanya aktivitas prostitusi yang dimana warga tidak mengambil tindakan sendiri, melainkan melaporkannya kepada yang berwenang. Selain itu juga antara Satpol PP dan Dinsos juga saling percaya dengan regulasi yang ada dan saling mehami dan ketergantungan. Kemudian komitmen bersama ditunjukkan dengan disempatkannya hadir dalam forum baik itu Mami Kasih maupun Akemisi, serta kegiatan yang terus rutin dilaksanakan. Mereka hanya sebatas hadir dalam forum namun minim partisipasi. Selanjutnya usai menghadiri forum kemudian menjalankan kerja atau program bersama juga merupakan bentuk komitmen berupa kepemilikan proses kolaborasi yang dijalankan

c. Pemahaman Bersama

Tahapan pemahaman bersama juga sudah terjadi, dimana *stakeholder* yakni Satpol PP, Dinsos, PCNU, Akademisi, LSM dan Masyarakat sudah bisa mengidentifikasi masalah bersama yang menyatakan praktik prostitusi harus segera diatasi karena menjadi anomali Situbondo sebagai Kota Santri. Pemahaman misi dalam kolaborasi juga sudah bisa diterima oleh pihak-pihak yang terlibat dengan identifikasi masalah bersama masih ada pihak yang pro terhadap kelangsungan lokalisasi.

d. Hasil Sementara

Setiap *stakeholder* sudah mempunyai cita-cita atau kesepakatan yang telah dicapai untuk proses kolaborasi yang berjalan. Fakta bersama juga diketahui bahwa WTS yang terjaring bukan berasal dari Kabupaten Situbondo. Namun hanya saja untuk indikator lain untuk agenda strategis ke depan belum disusun karena masih mengandalkan proses yang saat ini berjalan.

5.1.2 Faktor-faktor Penentu *Collaborative Governance*

Faktor-faktor yang menjadi penentu dalam keberhasilan kolaborasi juga telah diuraikan dalam hasil temuan dan analisis, dimana kesimpulannya yakni sebagai berikut:

a. Kondisi Awal

Faktor kondisi awal berupa dinamika yang terjadi juga dirasakan, yakni adanya ketidak sepahaman antara Satpol PP dan warga. Kemudian untuk sumberdaya yang terlibat tidak menjadi kendala atau sudah seimbang, hanya saja gejala yang terjadi yakni perbedaan antara Satpol PP dan warga sempat membuat kolaborasi tidak optimal lantaran warga merasa minim untuk partisipasi. Sedangkan untuk masalah SDM tidak menjadi persoalan dalam kolaborasi yang dilakukan.

b. Desain Kelembagaan

Faktor kelembagaan juga terlaksana dengan baik dengan adanya aturan yang jelas mengenai penanggulangan prostitusi berdasarkan Perbup setiap *stakeholder* bekerja dengan koridor atau tupoksinya masing-masing disertai

dengan keterbukaan antar pihak-pihak yang terlibat. Akan tetapi mengenai aturan main yang tertulis dalam proses kolaborasi tidak pernah tertulis, hanya berupa kesepakatan lisan.

c. Kepemimpinan Fasilitatif

Kolaborasi tidak berjalan optimal karena adanya kepemimpinan fasilitatif tidak terlalu dirasa, tidak ada pemberdayaan dan inovasi dalam setiap anggota sehingga rawan terjadinya konflik ego masing-masing anggota kolaborasi. Inilah yang kemudian menjadi catatan agar hendaknya sekda juga lebih dominan terlibat dalam proses.

Berdasarkan proses kolaborasi yang dilakukan, outcome atau dampaknya namun tetap bisa dirasakan, dimana jumlah WTS berkurang, mereka yang terjaring razia tidak sebanyak dahulu, dampak kolaborasi ini dapat dilihat dari WTS yang dirazia oleh Satpol PP dan kemudian diserahkan pada Dinsos untuk dilakukan pemberdayaan, pemberdayaan keterampilan.

5.2 Saran

Berdasarkan apa yang telah dijabarkan ada beberapa rekomendasi yang ditawarkan, tidak hanya untuk penelitian selanjutnya, akan tetapi juga rekomendasi atau saran untuk pemangku kebijakan terkait. Hal ini berdasarkan kendala atau temuan di lapangan yang ditemukan saat kolaborasi dalam penanggulangan prostitusi.

1. Perlunya komunikasi yang baik antara pihak yang terlibat, khususnya antara Satpol PP dan PCNU dalam hal pendekatan kepada WTS jika memang terjadi silang pendapat, karena pada dasarnya apa yang dilakukan baik PCNU dan Satpol

PP sama-sama ingin terlibat aktif dalam upaya menanggulangi prostitusi, hasil kesepakatan kemudian bisa dijadikan konsensus tertulis agar semua pihak bisa memahami apa yang telah menjadi kesepakatan saat dialog. Sehingga tidak ada beberapa pihak saja yang aktif berdialog atau tawar menawar. Hal ini diperlukan agar tidak ada peserta yang dominan dalam proses kolaborasi.

2. Hendaknya kepemimpinan fasilitatif dalam hal ini sekda lebih optimal dalam hal ini keterlibatan dalam proses kolaborasi yang dimana ternyata perannya kurang terlihat aktif sehingga tidak terlihat adanya pemberdayaan atau inovasi yang diberikan untuk kolaborasi yang dijalankan. Sekda seharusnya tidak hanya menampung, akan tetapi juga menjadi inisiator yang baik dalam kolaborasi agar kolaborasi menjadi lebih hidup.

3. Dibuat rencana strategis dengan disusun oleh stakeholder untuk capaian tujuan jangka Panjang dalam proses kolaborasi yang hendak dicapai disusun dengan terstruktur dan formal, tidak hanya kesepakatan lisan agar tidak hanya berpaku pada program yang berjalan saat ini.